

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan Pihak terkait lainnya dalam Pembangunan Nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Provinsi dan Kab/Kota pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Makro Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,6	75,18	0,777
2	Angka Kemiskinan	8,7	8,06	-7,356
3	Angka Pengangguran	4,33	4,19	-3,233
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,51	5,02	11,308
5	Pendapatan Perkapita	69,71	73,57	5,537
6	Gini Ratio	0,377	0,363	-3,714

Sumber data : BPS Prov. Sulsel

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang	90,516	86,806

	berpartisipasi dalam pendidikan menengah		
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	84,937	85,198

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Alokasi Anggaran APBD Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900/039/BKAD Tahun 2024 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sebesar 3.498.305.488.749,- dengan rincian:

- Belanja Operasional Rp. 2.927.551.341.586,-
- Belanja Modal Rp. 570.770.947.163,-

Berdasarkan jumlah anggaran tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp. 2.866.966.789.101,- atau 81,95%, dengan rincian:

- Belanja Operasional sebesar Rp. 2.401.942.724.928,- atau 82,05%.
- Belanja Modal sebesar Rp. 465.024.064.173,- atau 81,47%.

Berikut merupakan anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM pada Tahun 2024 di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan:

Tabel
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	APBD / Kegiatan			
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	723.015.776.633	703.142.273.506	97,25
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	401.711.275.250	385.705.371.804	96,02
3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	38.273.851.097	35.018.495.042	91,49
	APBN / DANA TRANSFER			
1	Pelaksanaan Pengelolaan DAK Reguler SMA	54.185.528.300,00	53.583.284.900,00	99,00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2	Pelaksanaan Pengelolaan DAK Penugasan SMK	111.600.036.000	96.563.568.740	86,52
3	Pelaksanaan Pengelolaan DAK Reguler SLB	8.363.760.000	6.884.726.594	83,09

C. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan

- a. Pemerataan Guru belum Sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya Pendidikan Menengah terutama sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana baik itu disekolah Pendidikan menengah maupun Pendidikan khusus.
- c. Berdasarkan Standar Kualifikasi tenaga pendidik formal di Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus terdapat masih banyaknya guru yang belum bersertifikat (Sertifikasi Guru).
- d. Standar Kompetensi dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu diupayakan standar Nasional.
- e. Informasi tentang pendidikan kurang diketahui masyarakat disebabkan tidak ada Sistem Informasi administrasi berbasis IT.
- f. Perubahan anggaran/revocusing sehingga kegiatan berjalan tidak maksimal.

Solusi

- a. Melalui Pemerataan dengan perpindahan dari sekolah yang kelebihan guru kesekolah yang kekurangan guru atau penambahan tenaga pendidik melalui penerimaan CPNS dan penerimaan melalui jalur P3K.
- b. Optimalisasi penggunaan Dana, baik yang bersumber APBD maupun yang bersumber dari APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.
- c. Memberikan semacam pelatihan atau kursus untuk menghadapi ujian sertifikasi guru.
- d. Melakukan Optimalisasi kegiatan PKG dan PKB.

- e. Pengadaan sistem informasi administrasi berbasis IT agar informasi tentang pendidikan muda dan cepat tersebar ke masyarakat melalui website.
- f. Usulan anggaran tidak ada pengurangan.

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,755	1,759
2.	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	86,4	95,238
3.	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100
4.	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100	100

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Alokasi anggaran Tahun 2024 di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah Rp. 311.676.700.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.56.918.100.- (29,03%).

Adapun rincian per kegiatan:

1. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, yaitu:
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UkM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana atau

berpotensi Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 229.596.700.- realisasi keuangan Rp. 33.088.100.- (14%).

2. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, yaitu:
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar biasa alokasi anggaran sebesar Rp. 82.080.000.- realisasinya Rp. 23.830.000.- (29.03%).

C. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan

- a. Integrasi Program belum berjalan sebagaimana mestinya khususnya kegiatan dengan sasaran yang sama.
- b. Kurangnya dukungan Anggaran dalam kegiatan Pra dan Pasca krisis dan bencana.
- c. Perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dalam penenganan krisis kesehatan dan bencana.
- d. Perlu adanya peningkatan dukungan dari pimpinan/pengambil kebijakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan lapangan pada kondisi Kejaadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sulawesi Selatan.
- e. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana (logistic) bencana/krisis Kesehatan.
- f. Masih terdapat beberapa indikator layanan dasar yang sulit dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya pemahaman mengenai indikator mutu layanan yang terdapat pada Permendagri No. 59 Tahun 2021.
- g. Masih kurangnya koordinasi antar lintas sektor dalam pelaksanaan program kejadian luar biasa dan pelaksanaan krisis Kesehatan.
- h. Belum dimanfaatkannya aplikasi Siscobidkes.
- i. Permasalahan teknis pada pengisian laporan SPM dalam aplikasi e-SPM belum dapat mengakomodir laporan secara faktual di lapangan.

- j. Krisis kesehatan masih berorientasi pada fase saat terjadi krisis/penanggulangan, yang seharusnya diutamakan pada fase pra krisis atau mitigasi resiko terjadinya krisis Kesehatan.
- k. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan terkait krisis kesehatan/kejadian bencana.
- l. Masih kurangnya SDM Kesehatan yang dilatih dalam Manajemen Krisis Kesehatan/Penanggulangan Bencana.

Solusi

- a. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian penerapan SPM yang menghadirkan Kementerian Kesehatan RI serta Biro Pemerintahan Setda Prov. Sulsel dan OPD pengampu agar dapat melihat kendala serta membantu memberikan solusi terkait indikator mutu layanan yang bermasalah termasuk dalam penguatan dukungan anggaran dalam peningkatan capaian SPM.
- b. Perlu diadakan bimbingan teknis atau petunjuk teknis terkait indikator-indikator mutu layanan yang terdapat pada Peraturan Kementerian Kesehatan No 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pemahaman mengenai indikator mutu layanan yang terdapat pada Permendagri No. 59 Tahun 2021.
- c. Sosialisasi internal dalam penguatan lintas sektore dan lintas program dalam penanggulangan krisis Kesehatan/bencana.
- d. Perlunya penguatan kapasitas SDM dan Sarana Prasarana daerah baik untuk pra krisis saat krisis dan pasca krisis Kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum

A. Capaian Kinerja Outcome

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	-	-
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai	-	-

	rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi		
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	63,434	57,709
4.	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0	0
5.	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	0	0
6.	Rasio kemantapan jalan	75,376	71,418
7.	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	38,579	131

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Pada tahun 2024, penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/ Kota dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten Kota, fokus anggaran lebih diarahkan pada kegiatan non-fisik seperti pendataan, penyusunan rencana, serta persiapan teknis dan administratif yang mendukung pemenuhan SPM untuk tahun anggaran berikutnya.

C. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan

Pada tahun ini kegiatan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas

Kabupaten/ Kota dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota tahun ini belum dapat terlaksana secara fisik, dikarenakan kendala perubahan anggaran.

Solusi

Untuk mengatasi kendala ini, langkah-langkah solusi telah disiapkan, antara lain dengan fokus pada kegiatan non-fisik terlebih dahulu seperti Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota dan Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota. Selain itu, koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait dan perumusan kebijakan baru terkait Sistem Penyediaan Air Minum dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SPM kedepannya.

4. Urusan Perumahan

A. *Capaian Kinerja Outcome*

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	0
2.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0
3.	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	27,008	0
4.	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	48,131	48,249

B. *Realisasi Belanja Urusan Perumahan*

Pada tahun ini, penganggaran untuk rehabilitasi rumah bencana di Provinsi

Sulawesi Selatan tidak mencakup alokasi untuk kegiatan fisik, mengingat bahwa Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat yang sebelumnya menjadi persyaratan untuk penganggaran fisik sudah selesai masa berlakunya. Sebagai alternatif, fokus anggaran lebih diarahkan pada kegiatan non-fisik seperti pendataan, penyusunan rencana, serta persiapan teknis dan administratif yang mendukung pemenuhan SPM untuk tahun anggaran berikutnya.

C. *Permasalahan yang Dihadapi*

Permasalahan

Pada tahun ini kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana di Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat dilaksanakan secara fisik. Hal ini disebabkan SK Tanggap Darurat yang menjadi persyaratan dalam penyusunan penganggaran, sehingga anggaran untuk kegiatan rehabilitasi rumah tidak dapat dialokasikan. Akibatnya, target pencapaian rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Solusi

Untuk mengatasi kendala ini, langkah-langkah solusi telah disiapkan, antara lain dengan fokus pada kegiatan non-fisik seperti pendataan ulang rumah yang korban bencana yang belum tertangani, penyusunan rencana rehabilitasi yang lebih rinci, serta penyusunan dokumen teknis dan administratif yang mendukung kelancaran rehabilitasi rumah pada anggaran tahun depan. Selain itu, koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait dan perumusan kebijakan baru terkait penganggaran perumahan akan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SPM kedepannya.

5. Urusan Trantibun Linmas

A. *Capaian Kinerja Outcome*

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	100	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	93,333	100

3.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	100
4.	Persentase penanganan pra bencana	100	100
5.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100

B. Realisasi Belanja Urusan Trantibunlinmas

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 2.000.148.300,00,- (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Jenis Layanan Dasar warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah telah dituangkan dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Berikut merupakan alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM pada Tahun 2024 di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan:

Tabel 4.16

**Alokasi Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM
pada Tahun 2024 di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Anggaran
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi	100 %	Januari – Desember 2024	2.000.148.300,00

C. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan

- a. Kurang Optimalnya kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 karena terkendala Biaya Operasional Kegiatan;

- b. Efektifitas pelaksanaan kegiatan awal tahun dilaksanakan di bulan Maret;
- c. Belum optimalnya Forum koordinasi kerjasama antar daerah dan lembaga/ Instansi terkait;
- d. Belum terintegrasinya Program kerja antar daerah dengan instansi terkait, sehingga penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum belum maksimal.

Solusi

- a. Pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan dengan jadwal penggunaan anggaran dan menghindari adanya penambahan volume pekerjaan dalam APBD Perubahan;
- b. Melaksanakan Forum koordinasi kerjasama antar daerah dan lembaga/Instansi terkait melalui Program kerja.;
- c. Menjalin koordinasi yang baik dan saling bersinergi antar daerah, instansi terkait jajaran TNI/Polri dalam mendukung situasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang kondusif.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
2.	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
4.	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
5.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang	100	100

	terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi		
--	---	--	--

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Alokasi Anggaran APBD Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/109/BKAD Tahun 2024, Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) sebesar Rp. 50.491.262.111,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 50.025.746.700,- sedangkan tingkat capaiannya kinerja dari 7 Program, 16 Kegiatan dan 52 sub kegiatan sebesar 100 % dengan kategori sangat baik untuk Semester II Tahun 2024.

Tabel 4.21

Anggaran, Realisasi Belanja dan Realisasi Fisik Bidang Urusan Sosial

	Anggaran	Realisasi	Realisasi Fisik
APBD	Rp. 50.491.262.111,-	Rp. 50.025.746.700,-	100 %

Berikut merupakan alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM pada Tahun 2024 di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan :

Tabel 4.22

Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM di Dinas Sosial

No.	Indikator	Anggaran (Rp.)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Rp. 22,632,100
2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Rp. 1,037,157,387
3	Presentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Rp. 572,776,260
4	Presentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Rp. 0

No.	Indikator	Anggaran (Rp.)
5	Presentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Provinsi	Rp. 65,744,600

C. Permasalahan yang Dihadapi

Mencermati pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial pada Tahun 2024 yang ada pada tabel data realisasi kinerja SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, hal yang dapat disimpulkan secara umum bahwa dilihat dari aspek kuantitas capaian target sangat memuaskan, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator mutu layanan yang masih perlu dipenuhi agar kualitas pelayanan sosial melampaui standar pelayanan minimal.

Permasalahan

- a. Adanya *refocusing* anggaran pada tahun 2024, sehingga pelayanan di Panti Anak (UPT Makkareso Maros, UPT Seroja Bone dan UPT Nirannuang Bulukumba) dapat dilaksanakan hanya 1 angkatan.
- b. Masih Kurangnya tenaga Kesehatan yang di tempatkan di masing-masing UPT.
- c. Sulitnya berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penerapan SPM.
- d. Masih terdapat beberapa indikator layanan dasar yang sulit dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya pemahaman mengenai indikator mutu layanan yang terdapat pada Permendagri No. 59 Tahun 2021.

Solusi

- a. Menyampaikan kepada TAPD mengenai kondisi tersebut dan menganggarkan ulang pada tahun berikutnya.
- b. Mengusulkan pengangkatan ASN bidang Kesehatan di masing-masing UPT.
- c. Perlu diadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan data dasar dalam penerapan SPM di daerah.
- d. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian penerapan SPM yang menghadirkan Kementerian Sosial RI serta Biro Pemerintahan Setda Prov.

Sulsel agar dapat melihat kendala serta membantu memberikan solusi terkait indikator mutu layanan yang bermasalah.

- e. Perlu diadakan bimbingan teknis atau petunjuk teknis terkait indikator-indikator mutu layanan yang terdapat pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022 yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan skor **3,3531** dengan atatus kinerja **Sedang**.
2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Nomor 45.B/LHP/XIX.MKS/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN PENYUSUNAN	REALISASI	PERSEN
PENDAPATAN DAERAH	10.163.532.219.616,00	9.993.473.327.773,61	98,33
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.518.380.163.616,00	5.375.764.443.434,61	97,42
Pendapatan Pajak Daerah	5.001.794.929.789,00	4.815.250.272.747,74	96,27
Pendapatan Retribusi Daerah	294.085.730.493,00	311.808.984.452,00	106,03
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	135.911.003.734,00	136.080.962.805,00	100,13
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86.588.499.600,00	112.624.223.429,87	130,07
PENDAPATAN TRANSFER	4.636.167.641.000,00	4.607.941.482.306,00	99,39
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	4.617.194.477.000,00	4.588.968.318.306,00	99,39
Dana Bagi Hasil (DBH)	341.235.150.000,00	367.902.367.000,00	107,81

Dana Alokasi Umum (DAU)	2.712.463.777.000,00	2.666.244.873.049,00	98,30
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	335.138.944.000,00	321.344.427.952,00	95,88
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.228.356.606.000,00	1.233.476.650.305,00	100,42
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	18.973.164.000,00	18.973.164.000,00	100,00
Dana Insentif Daerah (DID)	18.973.164.000,00	18.973.164.000,00	100,00
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8.984.415.000,00	9.767.402.033,00	108,71
Pendapatan Hibah	5.749.415.000,00	6.308.707.158,00	109,73
Pendapatan Dana darurat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	3.235.000.000,00	3.458.694.875,00	106,91
Jumlah	10.163.532.219.616,00	9.993.473.327.773,61	98,33

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PENGABDI SULSEL (Pengelolaan Aset berbasis Digital Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan)	Dengan menerapkan pengelolaan asset berbasis digital untuk stakeholders nantinya akan memiliki fungsi dalam pelaksanaan pengelolaan BMD dan memberikan pedoman terkait pengendalian dan pengawasan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	SILABITTE (Sistem Layak Bibit Ternak)	Inovasi ini memfasilitasi peternak dalam mendapatkan bibit

			ternak yang memenuhi standar kualitas, serta memberikan sertifikat yang dapat meningkatkan nilai dan kepercayaan terhadap bibit yang dihasilkan
3.	Badan Penghubung Daerah	Digitalisasi Penggunaan Buku tamu dengan QR Code pada Badan Penghubung Daerah Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan	Pada Badan Penghubung Daerah Sub Bidang Wilayah II, penggunaan QR Code dapat dilakukan untuk mempermudah tamu dalam melakukan pengisian permintaan fasilitasi layanan tamu.